JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan *Vol. 10 No. 1 Juli 2021*
p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 *DOI : doi.org/10.21009/jgg.101.03*

MODEL KETAHANAN PANGAN DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI PENGUATAN PERTANIAN KOMUNAL

Rasminto[1], Mihyal Ain[2]

[1] Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45, Komplek Universitas Islam 45 Bekasi Jl. Cut Meutia No.83 Bekasi 17113, ID Orcid: 0000-0003-3192-716X, ID Sinta: 6684509, ID Google Scholar: oPGLi4MAAAAJ, ID Scopus: 57212146958, ID Web of Science: AAI-3764-2021. E-mail: rasminto45@unismabekasi.ac.id

[2] Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 45, Komplek Universitas Islam 45 Bekasi Jl. Cut Meutia No.83 Bekasi 17113, E-mail: mihyalain22@gmail.com

Abstract

Semakin meningkatnya kasus penyebaran dan panularan COVID-19 ke berbagai negara di belahan dunia, menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu sektor prioritas yang perlu penanganan sesegera mungkin, karena pangan merupakan kebutuhan paling dasar umat manusia apalagi ditengah situasi pandemi, sebabnya ketahanan pangan ditutut terus bereskplorasi guna menemukan model penguatan pangan yang sesuai dan dapat menghasilkan produktifitas tinggi. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai model ketahanan pangan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 melalui model pertannian komunal dalam pertanian Indonesia, metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan. Kesimpulan yang di dapat dari kajian ini adalah model pertanian komunal memiliki prospek yang cerah dalam mendukung sektor pertanian Indonesia dimasa pandemi COVID-19 karena dengan model seperti ini memungkinkan terjadinya penguatan dari dalam sektor pertanian.

Keywords: *pandemi COVID-19, ketahanan pangan; pertanian komunal*

Abstract

The increasing number of cases of the spread and transmission of COVID-19 to various countries in the world requires prevention and control efforts. Food security is one of the priority sectors that needs to be addressed as soon as possible, because food is the most basic need of mankind, especially in the midst of a pandemic situation, that's why food security is required to continue to explore in order to find models for strengthening food that are suitable and can produce high productivity. Based on this, this study aims to provide information about the food security model in dealing with the impact of the COVID-19 pandemic through the communal agriculture model in Indonesian agriculture. The data collection method used in this study is a literature study. The conclusion that can be drawn from this study is that the communal farming model has bright prospects in supporting the Indonesian agricultural sector during the COVID-19 pandemic because this model allows for strengthening from within the agricultural sector.

Keywords: *pandemic COVID-19, food security, communal agriculture*

p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 *DOI : doi.org/10.21009/jgg.101.03*

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan jenis penyakit menular yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit menular ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 adalah coronavirus varian baru dimana sebelumnya belum pernah di identifikasi terdapat pada manusia. Setidaknya dua varian coronavirus yang diidentifikasi menyebabkan penyakit dan menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Kasus COVID-19 memiliki potensi ancaman tersendiri bagi penderitanya, dari yang ringan dan dapat disembuhkan hingga pada kasus COVID-19 berat yang berpotensi menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut bahkan kematian. Sejak diidentifikasi penemuan nya, peningkatan jumlah kasus positif Coronavirus Disease (COVID-19) berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai pada tanggal 9 Juli 2020, WHO melunjurkan data bahwa sejumlah 11.84.226 kasus Coronavirus Disease (COVID-19) dan dengan konfirmasi 545.481 kematian di seluruh dunia (*Case Fatality Rate*/CFR 4,6%). Termasuk Indonesia negara yang turut diterpa ganasnya sasaran COVID-19. Indonesia sendiri melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, tak sampai disitu konfirmasi kasus positif COVID-19 meningkat dan menyebar cepat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akibat banyaknya negara yang mengkonfirmasi kasus positif COVID-19. WHO menetapkan Coronavirus Disease (COVID-19) sebagai pandemi. Adanya kasus COVID-19 ini tentu membawa dampak pada segala aspek kehidupan bernegara baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Melihat kompleksnya dampak yang ditimbulkan Pemerintah Indonesia menetapkan (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, maka upaya pemerintah Indonesia untuk terbebas dari kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pun di galakan, melalui ditetapkan nya (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseasef* 2019 (COVID-19). Oleh

sebabnya pemerintah menghimbauan masyarakat untuk seperti: melakukan pekerjaan dari rumah atau *working for home*, menjaga jarak secara fisik atau *social/physical distancing*, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah untuk melakukan karantina wilayah secara parsial disertai melakukan pembatasan kegiatan terutama di keramaian (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Tentu dengan adanya kebijakan tersebut tidak serta merta tidak menimbulkan distabilitas apapun, bahkan melampaui hal itu, pandemi COVID-19 bahkan telah merubah semua tatanan kehidupan, termasuk pola rantai pasokan pangan. Yang menjadi urgensi pangan merupakan urusan kebutuhan paling mendasar manusia selain sandang dan papan (Hirawan & Verselita, 2020). Maka isu sentral ini memerlukan penanganan secepat mungkin, pasokan pangan erat kaitannya dengan bagaimana kondisi ketahanan pangan.

Menurut (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012) tentang mendefinisikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Negara-negara Global South sudah berada dalam posisi genting dalam rantai pasokan global, rumah tangga dengan penduduk termiskin di negara-negara ini selalu dinarasikan "berjarak satu hari dari kehilangan pendapatan, kerawanan pangan, biaya hidup yang tidak dapat diprediksi, dan migrasi paksa" (IPES-Food, 2020) meskipun pada faktanya mereka yang menjadi ujung tombak penghasil bahan pangan (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Menelisik dari hal tersebut, benar saja Indonesia sebagai bagian dari negara Global South pun tak luput diterpa gejolak keterpurukan akibat pandemi COVID-19. (Anwar, 2021) data yang tercatat oleh Pusat Statistik BPS adanya kegiatan impor beras terhadap Indonesia sebanyak 356.286 ton secara kumulatif sepanjang tahun 2020. Hal ini lah yang menandakan Indonesia sebagai negara agraris belum cukup tanggung untuk mempertahan kan diri dalam menghadapi gangguan dan ancaman. Sebab sadar karena isu pangan ini menjadi hal yang sangat mendasar, maka pemerintah perlu mengevaluasi kinerja maupun kebijakan bagi pertanian Indonesia, evaluasi yang dapat menciptakan pembaharuan bagi

sistem pertanian Indonesia, misalnya segi model sistem pertanian. Oleh karena nya penulis mencoba berhipotesis dalam memberikan solusi di masa pandemi COVID-19 melalui sistem pertanian komunal. Sistem pertanian komunal merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk mengupayakan stabilnya pasokan pangan dalam menghadapi dampak COVID-19.

Sistem pertanian komunal adalah upaya produksi pertanian yang dijalankan oleh beberapa petani dengan bersama-sama, sistem ini sering kali menjadi sebuah koperaasi pertanian. Pertanian komunal ini telah di realisasikan diberbagai negara, seperti Uni Soviet yang pertanian komunal/kolektif nya dijalankan oleh sistem koperasi dengan nama 'kolkhozy' dan dijalankan oleh negara dengan nama 'sovkhozy'(Wikipedia). Selain itu, pertanian komunal juga di realisasikan oleh Pemerintah Penang, Malaysia. Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengatakan bahwa pertanian komunal memiliki prospek yang cerah cerah, terutama dengan adanya teknologi baru yang terus berkembang, bahkan pihaknya menargetkan agar mewujudkan 100 proyek pertanian komunal pada tahun 2025 guna membantu dalam memastikan keamanan pangan Malaysia. Pertanian komunal merupakan terobosan dari sektor pertanian dalam menciptakan sistem pertanian yang tanggung.

Indonesia dilihat dari potensi sumberdaya alamnya juga dapat dikembangkan potensinya sebagai negara agraris dalam membangun ketahanan pangan nasional. Letak Indonesia pada garis khatulistiwa memiliki tipe iklim tropis yang selama setahun memiliki dua musim yakni musim penghujan dan kemarau. Penduduk Indonesia bercorak kehidupan sebagai petani atau dapat dikatakan merupakan penduduk yang bercorak agraris, hal ini didukung dengan keberhasilan swasembada beras di tahun 1984 (Raminto et al., 2018). Selain itu, perlu dilakukan upaya pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang sangat berkaitan erat dalam membangun ketahanan pangan karena petanilah yang mengatur proses dan pelaksanaan dalam usaha taninya (Rasminto, 2016).

Dari uraian di atas, maka identifikasi masalah yang ada yakni; Pertama, kondisi ketahanan pangan Indonesia; Kedua, pengembangan model pertanian komunal dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19. Ketahanan pangan melalui pembaharuan model pertanian komunal sangat penting sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara Agraris yang tangguh karena

adanya satu kesatuan, baik dari perencanaan, pemodelan, pelaksanaan, pendistibusian, pemanfaatan teknoogi dan lain sebagainya. Nilai guna dari penulisan ini adalah untuk memberikan manfaat khususnya aparat kementrian Pertanian Indonesia dalam mendukung pengembangan pertanian di Indonesia melalui sistem pertanian komunal.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis disertai dengan pendekatan secara empiris dan studi kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah dan atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Membangun Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan Pangan berdasarkan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 2012) adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan pada konsep dasar ketahanan pangan di atas, maka aspek strategis dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yakni aspek ketersediaan, stabilitas, akses dan penggunaan pangan (Saliem and Ariani, 2016). Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan yang berada di tingkat makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan yang berada di tingkat mikro, terpenuhinya kondisi masing-masing aspek ini secara simultan adalah syarat mutlak demi terwujudnya ketahanan pangan yang memadai .

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai tersedianya pasokan pangan dalam jumlah dan kualitas yang tercukupi, terdistribusi dengan penerapan harga terjangkau lagi aman dikonsumsi bagi setiap warga guna menopang aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional (Saliem & Ariani, 2016). Membahas ketahanan pangan pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan menganai orang yang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Hal-hal tersebut meliputi antara lain tersedianya pangan, kemudian lapangan kerja dan pendapatan. Ketiga hal tersebut menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki ketahanan pangan atau tidak, artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya (Sumarwan, dan Sukandar, (Saliem and Ariani, 2016)

Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia dan Penerapan Model Pertanian Komunal

(Global Food Security Index) tahun 2020 mengeluarkan data ketahanan pangan inegara-negara di Dunia. Indonesia berada pada peringkat 65 dari 113 negara di dunia. Sedang jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang diukur dari beberapa indikator seperti: keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta sumber daya alam dan ketahanan, posisi Indonesia berada jauh di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand namun melampaui Filiphina dan Myanmar. Seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Perbandingan Ketahanan Pangan Negara ASEAN

Indikator	**Nillai**	**Ranking**	**Nilai**	**Ranking**	**Rata-Rata Nilai Seluruh Dunia**
	Indonesia		**Malaysia**		
OVERALL FOOD SECURITY ENVIRONMENT	**59,5**	**65**	**67,9**	**43**	**60,4**
1) Keterjangkauan	73,5	55	85,5	25	65,9
2) Ketersediaan	64,7	34	58,8	56	57,3
3) Kualitas dan Keamanan	49,6	89	72,5	50	67,6
4) SDA dan Ketahanan	34,1	109	47,5	52	49,1
Indikator	**Nillai**	**Ranking**	**Nilai**	**Ranking**	**Rata-Rata Nilai Seluruh Dunia**
	Myanmar		**Singapura**		
OVERALL FOOD SECURITY ENVIRONMENT	**56,6**	**70**	**75,7**	**19**	**60,4**
1) Keterjangkauan	58,1	73	87,3	19	65,9
2) Ketersediaan	53,9	69	75,8	2	57,3
3) Kualitas dan Keamanan	59,3	72	82,3	36	67,6
4) SDA dan Ketahanan	56,3	20	47,4	53	49,1
Indikator	**Nillai**	**Ranking**	**Nilai**	**Ranking**	**Rata-Rata Nilai Seluruh Dunia**
	Filiphina		**Thailand**		
OVERALL FOOD SECURITY ENVIRONMENT	**55,7**	**73**	**64,0**	**51**	**60,4**
1) Keterjangkauan	66,5	64	82,8	32	65,9
2) Ketersediaan	57,6	61	55,3	67	57,3
3) Kualitas dan Keamanan	52,0	85	59,5	71	67,6
4) SDA dan Ketahanan	35,8	107	50,0	43	49,1

Sumber: Global Food Security Index (GFSI), 2021

Peran produsen yang dalam hal ini adalah petani dalam rangka manjaga rantai pasokan pangan dalam negeri sangat penting, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang merupakan ujian dan menuntut adanya penyesuaian yang cenderung bersifat masif. Hampir seluruh negara-negara di dunia sedang berusaha

p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 *DOI : doi.org/10.21009/jgg.101.03*

untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri, hal ini karena jalur perdagangan internasional yang terganggu semenjak wabah COVID-19. Alhasil produksi dalam negeri menjadi tumpuan satu-satunya utama yang di pegang negara-negara pada saat ini, sama hal nya dengan Indonesia.

Pada tanggal 28 April 2020, permasalahan krisis pangan dan malnutrisi mencuat kembali di permukaan dalam poros kesadaran publik, ketika Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa akan mengalami krisis pangan menyusul defisit pada sebelas jenis komoditas bahan pangan pokok akibat imbas rantai pasokan pangan yang terganggu karena pandemi COVID-19 (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Selain itu (Anwar, 2021) Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kegiatan impor beras terhadap Indonesia sebanyak 356.286 ton secara kumulatif sepanjang tahun 2020. Hal ini menandai Indonesia mengemban beban ketergantungan yang relatif besar pada impor beras untuk memenuhi permintaan dalam negeri, padahal Indonesai adalah negara agraris yang memiliki kemampuan kemandirian untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, sebabnya hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran besar pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediski kapan berakhir.

Tantangan dan ancaman yang sifatnya tidak dapat di prediksi namun tetap bisa dipersiapkan dalam rangka menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, seperti pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda. Sebabnya, sebagai bangsa yang berkembnag seharusnya dapat belajar dari Pandemi Covid-19 dan mempersiapkan diri dalam menciptakan penguatan sektor pangan, pasalnya pangan menjadi sektor paling pokok dan prioritas sehingga di tuntut untuk tangguh kapan pun dan dalam kondisi apapun. Dalam upaya perbaikan menuju penguatan tersebut tentu di butuhkan penyiapan strategi baru, seperti hal nya pembaharuan dalam sistem model pertanian.

Tompkins dan Adger dalam (Saliem & Ariani, 2016) berpendapat pengelolaan lahan berbasiskan komunitas (*community-based and management*), baik secara komunal maupun secara individual, memiliki kecenderungan kuat dalam membangun ketangguhan sosial dan ekosistem, serta merupakan salah satu cara yang efektif dalam menangani perubahan lingkungan yang dicirikan okeh resiko yang tak terduga. Ketangguhan sosial dan ekologi adalah suatu karakteristik sistem

p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020 *DOI : doi.org/10.21009/jgg.101.03*

alam. Pengelolaan lahan pertanian pengelolaan pertanian di lahan komunal pada umumnya memiliki kemerataan tinggi karena semua anggota komunitas dapat melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia. Keberlanjutan atau sustainability pengelolaan komunitas juga tinggi karena tidak tergantung pada input dari luar ekosistem tempat mereka berusaha. Sistem komunal tersebut jika di kelola dengan perencanaan yang tepat hambatan-hambatan seperti perubahan iklim dan gangguan hama penyakit dapat teratasi. Apalagi sistem komunal memungkinkan para kesatua petani mebentuk sistem ke arah pemanfaatan teknologi yang modern, yang dapat menjadi solusi terbaik di tengah petani Indonesia yang masih tradisional.

Pertanian komunal ini telah di realisasikan diberbagai negara, seperti negara tetangga Malaysia. (Dian, 2020) Malaysia berhasil menjadi negara 50 besar negara dengan sistem ketahanan pangan terkuat di Dunia yang tercatat oleh Food Security Index (GFSI) tahun 2020. Pemerintah Negri Jiran tersebut menargetkan terdapat 100 proyek pertanian komunal pada tahun 2025 mendatang guna membantu memastikan keamanan pangan di Malaysia. Ketua Menteri Chow Kon Yeow menyebut pertanian komunal memiliki prospek cerah, apalagi jika disandingkan dengan pengaplikaisan teknologi baru saat ini yang terus berkembang. Pihaknya juga mengatakan proyek pertanian komunal adalah bagian dari visi Penang di tahun 2030 yang di dukung sepenuhnya dalam permasalahan dana oleh Think City, sebuah organisasi sosial dengan misi menjadikan kota lebih ramah masyarakat, tangguh, dan layak huni. Proyek ini juga didukung oleh stakholder akademisi yakni Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Direktur pelaksana Think City, Hamdan Abdul Majeed menambahkan pertanian model ini sangat penting di masa depan karena melihat manfaatnya bagi masyarakat yang tidak terhitung, pertanian komunal juga berpotensi akan memungkinkan terjadi peningkatan kapasitas untuk mencetak lebih banyak agropreneur dan mendorong kaum muda untuk terjun ke industri ini.

Melihat hal ini sebabnya Indonesia dapat belajar dari negara tetangga apalagi dalam menghadapi pandemi ini memiliki tekanan yang kemudian muncul dorongan untuk maju dan bergerak bersama. Selain itu, melihat pertanian indonesia adalah pertanian yang masih bersifat tradisional dengan kepemilikan lahan pertanian yang kurang lebih relatif sempit. Maka dengan

pertanian komunal ini petani di integrasi dan mewujudkan pertanian komunal, Tentu guna merealisasikan ini butuh adanya dorongan dari pemeritah pusat dan daerah, sehingga dengan adanya kerja sama yang baik maka pasokan pangan dan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 Jilid 2 menjadi tangguh. Pengelolaan lahan pertanian pengelolaan pertanian di lahan komunal pada umumnya memiliki kemerataan tinggi karena semua anggota komunitas dapat melaksanakannya dengan sumber daya yang tersedia. Keberlanjutan atau sustainability pengelolaan komunitas juga tinggi karena tidak tergantung pada input dari luar ekosistem tempat mereka berusaha. Manajemen kegiatan pertanian di lahan komunal pada dasarnya merupakan suatu respon sosial-ekologi terhadap perubahan iklim dalan jangka panjang.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dipaparkan menunjukan bahwa di tengah gejolak situasi pandemi COVID-19 saat ini yang kemudian ditandai dengan defisit bahan makanan serta kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah perlu mengambil langkah mengevalusi serta mengupgrade sistem pertanian Indonesia menuju kearah penguatan dalam internal produsen serta menciptakan model pertanian yang tepat guna dan mewujudkan pertanian indonesia yang tangguh dan meimiliki produktifitas tinggi sehingga bukan hanya mengembalikan eksistensi sebagai negara agraris tetapi untuk menciptakan ketahanan pangan yang survive dalam keadaan apapun. Sistem pertanian komunal merupakan jawaban yang mencoba penulis sumbangkan mengingat sebagai kesatuan bangsa Indonesia selayaknya bahu membahu memberikan solusi atas permasalahan yang sedang Indonesia alami. Sistem pertanian komunal memiliki prospek yang cerah dalam menciptakan ketangguhan karena di dorong dengan adanya satu kesatuan yang bergerak bersama, dan sistem pertanian komunal juga terbukti telah mengantarkan negara-negara yang menerapkan sistem tersebut pada penguatan ketahanan pangan dalam negerinya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. (2021). *BPS Ungkap Indonesia Masih Impor Beras 356.286 Ton di 2020*. Www.Compas.Com. https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140638626/bps-ungkap-indonesia-masih-impor-beras-356286-ton-di-2020?page=all

Dian, M. (2020). *Pastikan Keamanan Pangan, Penang Kembangkan Pertanian Komunal*. Www.SARIAGRI.Com.

https://pertanian.sariagri.id/60283/pastikan-keamanan-pangan-penang-kembangkan-pertanian-komunal

Hirawan, F. B., & Verselita, A. A. (2020). Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *Csis Commentaries*, *april*(CSIS Commentaries DMRU-048-ID), 1–7.

Index, G. F. S. (n.d.). *Global Food Security Index Ranking*. Foodsecurityindex.Eiu.Com. Retrieved August 2, 2021, from https://foodsecurityindex.eiu.com/

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MenKes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *MenKes/413/2020*, *2019*, 207.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Raminto, Khausar, & Setiawan, C. (2018). Tinjauan Spasial Produksi Padi dalam Upaya Meningkatkan Pangan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Genta Mulia*, *VII*, 52–71.

Rasminto, R. (2016). Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, *17*(02), 62–75. https://doi.org/10.21009/plpb.172.01

Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *20*(1), 12. https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24

Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa*, *6*(2). https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, (2012).

Wikipedia. (n.d.). *Pertanian kolektif*. Retrieved August 2, 2021, from https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_kolektif